

MOTIF DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DENGAN CINA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PERAIRAN NATUNA UTARA TAHUN 2019

Oleh : Rizpani Debora
Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63277

ABSTRACT

Indonesia objected to the unilateral claim of the Natuna waters map made by the Chinese government. The map shows nine dots nine dash line which determines the boundaries of the territory that is part of China's territory over parts of the Natuna Waters. The overlapping claims referred to by China are areas referred to as traditional fishing grounds which are not recognized in the international law of the sea UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). This has become a guideline for China to continue committing illegal fishing in Indonesia's sovereign territory. Indonesia must face this potential conflict considering that China stated that part of the North Natuna Waters is its territory.

This research uses the theory of Indonesian defense diplomacy, influenced by a realism perspective where Indonesia has an interest in fighting for and defending its national interests anticipating conflicts in the North Natuna Waters, as well as maintaining Indonesia's maritime stability and sovereignty. Forms and efforts to resolve illegal fishing are carried out by increasing security in the North Natuna Waters by the Indonesian Navy with the support of the government and the relevant agencies.

Indonesia's strategy in maintaining defense diplomacy peacefully is motivated by the cooperation between Indonesia and China been doing for a long time. Both countries strengthen cooperation in several strategic sectors such as trade, finance, infrastructure, industry, tourism, to politics and security. In the era of President Joko Widodo's administration, economic cooperation between Indonesia and China was also very dynamic in various fields. So that this relationship is the reason for Indonesia to continue to maintain peaceful diplomacy.

Keywords: North Natuna Waters, Unilateral Claim, National Interest, Defense Diplomacy.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan letak geografis yang strategis. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia terdiri dari pulau – pulau kecil maupun pulau – pulau besar, menurut perhitungan Dinas Hidro Oseanografi

(DICHIDROS) TNI AL pada tahun 1982 berjumlah lebih – kurang 17.508 pulau dan memiliki garis pantai 81.000 Km, serta laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta Km². Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki luas wilayah laut 75% sedangkan luas wilayah darat 25%, Indonesia berpotensi mendapatkan ancaman di wilayah kelautan terhadap kedaulatannya.¹

Natuna merupakan sebuah gugusan kepulauan di bagian paling utara Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan provinsi terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam. Dengan total luas wilayah 141.901 km² atau tiga kali lebih luas Provinsi Sumatera Barat. Tetapi dari total tersebut, 138.666 km² (97,6%) merupakan lautan dan hanya 3.232,2 km² (2,4% saja yang hanya berupa daratan dari 271 pulau besar dan kecil di kawasan itu pulau yang terbesar di Natuna adalah Pulau Bunguran. Pulau-pulau yang lebih kecil di antaranya Pulau Jemaja, Pulau Serasan, Pulau Midai, Pulau Bintang, dan Pulau Sedanau di bagian selatan, serta

¹ Suhartati M. Natsir, M. Subkhan, Rubiman, dan singgih P.A Wibowo, —Komunitas Foraminifera Bentuk di Perairan Kepulauan Natuna, dalam Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 3, No. 2, Hal 21-23, Desember 2011

Pulau Laut di utara yang lebih dekat ke vietnam daripada ke Batam.

Dilihat dari garis Pantai Pulau Natuna dan pulau-pulau terluar di sekitarnya, di tarik garis lurus sejauh 200 mil laut menjadi zona ZEE berikut landas kontinen yang telah sah menjadi wilayah kedaulatan Republik Indonesia secara hukum internasional.² Konflik Laut Natuna Utara yang berdampak ke Indonesia, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Damos Dumoli Agusman³ menjelaskan bahwa persoalan di Perairan Natuna Utara harus di bedakan atas dua hal. Pertama yaitu isu mengenai sengketa kepemilikan pulau dan yang kedua mengenai delimitasi batas maritim. Dalam sengketa kepemilikan pulau, Indonesia bukanlah negara pengklaim sehingga tidak terlibat dalam isu pertama ini. Alasannya, tidak ada sengketa pulau antara Indonesia dengan negara-negara lain baik itu dengan Cina maupun dengan negara ASEAN di Perairan Natuna Utara. Pada isu kedua mengenai delimitasi batas maritim, Indonesia terlibat. Dalam mengatasi isu ini, Indonesia telah melakukan perjanjian kesepakatan dengan Malaysia dan Vietnam terkait batas landas kontinentalnya.

DAMOS Dumoli menjelaskan bahwa yang menjadi akar persoalan di antara Indonesia dan Cina adalah *nine-*

² Ibid, hal 23

³ Damos Dumoli Agusman, The South China Sea UNCLOS Tribunal Award 2016 : What It Has Changed an What It Does Mean to Indonesia. Indonesian Journal of Internatioal Law, Vol. 14(2) Januari 2017.

dash line pada tahun 1993. Dalam acara *Workshop on Managing Potensia Conflicts in the South China Sea*⁴ delegasi Cina mendistribusikan satu peta yang di dalamnya tercantum *nine-dash line* menjorok hingga perairan Natuna yang mana sekitar 30 persen laut Natuna di klaim masuk ke dalam bagian Laut Cina Selatan. Hal tersebut menimbulkan reaksi dari Indonesia yang mempertanyakan maksud dari peta tersebut. Pemerintah Indonesia yang merasa tidak terlibat dalam pengklaiman wilayah Kepulauan Natuna. Namun atas kebingungan Indonesia yang menuntut penjelasan, Cina tidak menjelaskan dan justru mempersilahkan Indonesia untuk menafsirkan sendiri maksud dari peta tersebut. Berdasarkan pernyataan Damos

Dumoli Agusman, *nine-dash line* di gunakan Cina sebagai dasar untuk memperbolehkan nelayannya masuk dan mencari ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Pada titik inilah persoalan antara Indonesia dan Cina muncul.

Hubungan Indonesia dengan Cina memasuki babak baru setelah sebelumnya memiliki hubungan bilateral yang relatif mesra di tandai dengan investasi Cina di Indonesia. Hubungan yang kini dinamis di sebabkan oleh keberadaan *nine-dash line* yang mengancam di perairan Natuna. *Nine-dash line* Cina mulai menjadi persoalan yang serius bagi Indonesia pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 19 Maret kala terjadinya insiden antara kapal penjaga KRI Imam Bonjol atau kapal pengawas laut milik Kementerian

⁴ Damos Dumoli Agusman, *The South China Sea UNCLOS Tribunal Award 2016 : What It Has Changed an What It Does Mean to Indonsia*. Indonesian Journal of Internaiocal Law, Vol. 14(2) Januari 2017

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan kapal penjaga laut Cina yang meletup di perairan Natuna.⁵ Untuk pertama kalinya sejak *nine-dash line* Cina memasuki wilayah perairan Natuna Utara dan melakukan *Illegal Fishing*. Pada 19 Desember 2019, lagi-lagi kapal Cina masuk ke perairan Natuna, Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang menjaga perbatasan maritim Indonesia telah mencoba mengusirnya pada tanggal 2 Januari 2020.⁶ Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan perairan internasional (termasuk Laut Cina Selatan) yang di dalam tata laut Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis.⁷ Menjadikan kawasan ini

mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Kegiatan penangkapan ikan (*illegal fishing*) yang di lakukan oleh kapal nelayan dan Coast Guard Cina dengan memasuki wilayah ZEE Laut Natuna Utara tentu saja melanggar kedaulatan RI dan Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982.

Ketidaktaatan Cina terlihat ketika Cina secara eksplisit mengeluarkan peta *nine-dash line* pada 1947. Cina

⁵ BBC News Indoesia, *China Protes Penembakan Kapal Nelayan, TNI AL : Kami Tidak Brutal*. 20 Juni 2016
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160620_indonesia_tnial_bantah_bantah_kapalcina Di akses pada tanggal 06 Novemberi 2020

⁶ Kompas.com, *Masuknya Kapal China ke Perairan Natuna yang diprotes Indonsia*
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/31/164819565/masuknya-kapal-china-ke-perairan-natuna-yang-diprotes-Indonesia?amp=1&page=2> di akses pada tanggal 06 Februari 2020.

⁷ Mohammad Rosyidin, *Isu Natuna dan Kebijakan Realpolitik Indonesia, Analisis CSIS*, Vol 45 (4), Kuartal keempat 2016

mengajukan klaim ini berdasarkan prinsip —historical waters”, membebaskan nelayan Cina untuk bebas mengambil sumber daya perairan di Natuna Utara di wilayah *Traditional Fishing Ground-nya*. Secara tersirat klaim tentang *Traditional Fishing Ground* tersebut berpotensi sebagai bentuk pengingkaran China terhadap status hukum perairan Natuna sebagai bagian dari perairan Negara Kepulauan Indonesia.⁸ Kebijakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melalui Marsekal Pertama Rony Irianto Moningga untuk mengarahkan empat jet tempur F-16, enam penerbang serta puluhan personel TNI Angkatan Udara ke Natuna tentu saja kebijakan yang rasional.

Dalam konteks hubungan interasional, maka secara realistis sebuah negara akan melakukan Diplomasi Pertahanan terhadap ancaman yang datang dari negara lain melalui peningkatan jumlah pasukan dan armada tempur baik melalui udara (*first strike*) dan patroli di wilayah teritorial perairan.⁹

Ada dua bentuk strategi yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu strategi kedalam, bahwa Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan peningkatan jumlah pasukan dan alat tempur di wilayah perbatasan perairan Natuna Utara, kedua strategi keluar Indonesia melakukan berupa Diplomasi Damai yang dilakukan dengan mengirim nota protes diplomatik Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Cina melalui duta besar Cina untuk Indonesia.¹⁰

⁸ Dipo Law Jurnal, hal. 6

⁹ Dikutip dari Rendi Prayuda dalam Tribun Pekanbaru, Rabu, 8 Januari 2020

¹⁰ Hendra Maujana Saragih, Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (JIPSI) Vo. 8 (1) Juni 2018.

Indonesia pasti memiliki alasan di balik kebijakan dalam menjaga pertahanan dan keamanan perbatasan maritim Indonesia. Mengenai respon Indonesia terhadap konflik klaim tumpang tindih dan masuknya kapal nelayan Cina yang melakukan *illegal fishing* di Perairan Natuna Utara Indonesia ini memunculkan pertanyaan penelitian : **Apa motif diplomasi pertahanan Indonesia dengan Cina dalam konflik di wilayah Perairan Natuna Utara pada tahun 2019?**

KERANGKA TEORI

a. Perspektif : Neorealisme

Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif neorealisme. Neorealisme merupakan salah satu teori dalam hubungan internasional yang berfokus pada analisis sistem internasional dan bagaimana karakteristik sistem mempengaruhi perilaku negara. Fokus utama sebuah negara seharusnya tidak hanya memaksimalkan power tetapi menjaga posisinya di dalam sistem internasional.¹¹

Pemikiran neorealisme menekankan bagaimana karakteristik sistem internasional mempengaruhi perilaku negara dan bagaimana negara-negara mempertimbangkan keamanan nasional dan kepentingan ekonomi dalam membuat keputusan. Ini membantu memahami bagaimana sistem internasional berfungsi dan bagaimana negara-negara berinteraksi satu sama lain. Mengutamakan keamanan nasional sendiri atau secara agresif yang mengutamakan peningkatan kekuatan dan

¹¹ Waltz, K. 1979. *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hills

mengejar hegemoni di areanya. Kekuatan (power) dalam pandangan neorealisme adalah kapabilitas material yang mampu dikontrol oleh negara.¹²

Dalam hal ini, neorealisme sepakat dengan realisme klasik bahwa militer dan ekonomi adalah penentu kualitas power suatu negara. Maka, dalam pandangan neorealisme, negara yang kuat adalah negara yang mempunyai kapasitas militer dan ekonomi yang kuat. Bagi neorealis, terutama Waltz, perilaku negara cenderung dipengaruhi oleh struktur internasional yang menjadi arena bagi politik internasional. Neorealisme melihat politik internasional sebagai struggle for power, tetapi neorealis lebih percaya bahwa perilaku negara yang cenderung konfliktual lebih dikarenakan struktur internasional yang anarkis daripada sifat dasar manusia yang konfliktual.¹³ Dalam pandangan neorealisme negara menjadi aktor utama dalam politik internasional.

b. Teori : Diplomasi Pertahanan

Penelitian ini menggunakan Teori Diplomasi Diplomasi Pertahanan. Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi dipakai sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional.¹⁴ Penyelesaian konflik Laut Natuna Utara di wilayah

Asia Tenggara oleh C.P.F.Luhulima dalam tulisannya adalah dengan teori Multytrack Diplomacy dimana memakai Track one point five yang di kembangkan untuk mencapai efisiensi dalam menghadapi konflik antar negara di kawasan Asia Tenggara dengan proyek *Managing Potential conflicts in the South Cina Sea* yang nama proyek tersebut bertujuan untuk mendorong kerjasama regional di kawasan Laut Natuna Utara¹⁵ Teori *Track-one-point-five* ini berkesinambungan dengan konflik antara Indonesia dan China di perairan Natuna Utara. Namun, secara khusus peneliti akan memakai teori Diplomasi Pertahanan sebagai bentuk jalan damai yang di pakai Indonesia. Pemahaman keamanan modern telah mengalami perubahan. Negara tidak lagi memahami keamanan hanya sebatas ancaman dari negara lain yang bersifat miiter. Isu yang berkembang dalam keamanan saat ini mulai dari keamanan pangan, ekonomi, sumber daya dan sebagainya.¹⁶ Diplomasi pertahanan merupakan proses dimana tidak hanya melibatkan negara saja, namun juga organisasi non-pemerintahan, think tank dan masyarakat sipil. Inilah yang membedakannya dengan Diplomasi militer yang fokus hanya pada penggunaan kekuatan militer.

Diplomasi pertahanan bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar negara melalui jalur-jalur formal maupun informal. Diplomasi pertahanan menjadi alat penting dalam kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri suatu negara.¹⁷

¹² Mearsheimer, John J., (2001), *The Tragedy of Great Power Politics*. W.W. Norton

¹³ James, Patrick, (1993), —*Neorealism as a Research Enterprise: Toward Elaborated Structural Realism*, *International Political Science Review*, 14(2), 123-148

¹⁴ S. L. Roy, 199, *Diplomacy*, ter. Heerwanto, Mirsawati, Jakarta : Rajawali Pers.

¹⁵ C. P. F. Luhuliima, *Pendekatan Multitrack dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan : Upaya dan Tantangan*, *Global Jurnal* Vol. 9 (1). Mei, 2007.

¹⁶ Loc Cit, Hendra Maujan S, *JIPSI* Vol. 8 (1). Hal 51

¹⁷ Ibid, hal 52.

Indonesia salah satunya, negara yang memakai jalan damai dalam menyelesaikan kasus *illegal fishing* masuknya kapal nelayan Cina ke wilayah ZEE Perairan Natuna Utara.

c. Tingkat Analisa Negara Bangsa

Ada lima tingkat analisis untuk memahami perilaku aktor hubungan internasional menurut Patrick Morgan. Pertama, tingkat analisis individu, yang melihat fenomena hubungan internasional sebagai interaksi individu. Kedua, tingkat analisis kelompok individu, yang berasumsi bahwa individu melakukan tindakan internasional dalam suatu kelompok. Ketiga, tingkat analisis kelompok negara-bangsa, yang menekankan pada perilaku negara sebagai penentu. Keempat, tingkat analisis kelompok negara-negara, yang menganggap bahwa hubungan internasional adalah interaksi yang dibentuk oleh kelompok negara. Kelima, tingkat analisis sistem internasional, yang dianggap sebagai penyebab terjadinya perilaku dan interaksi antar aktor.¹⁸ Pada penelitian ini, penulis menggunakan tingkat analisis kelompok negara-bangsa setiap keputusan yang dibentuk oleh sebuah negara, akan berakhir sama dengan negara lainnya jika berhadapan pada situasi yang sama. Negara dianggap sebagai aktor yang dominan dalam membuat keputusan tentang hubungan internasional, terutama politik luar negeri suatu negara.

d. Konsep : Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan atau

¹⁸ Patrick Morgan, 1982. *Theories and Approaches to International Politics : What are We Think?* New Brunswick, Transaction.

menganjurkan perilaku internasional.¹⁹ Penelitian ini mengangkat alasan Indonesia berdiplomasi damai dengan Cina atas konflik *illegal fishing* di Perairan Natuna Utara. Indonesia memakai jalan damai untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan Nasional adalah tujuan mendasar serta faktor paling penting yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Dikutip dari Mohtar Mas' oed dalam buku *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, beliau mengutip Hans J Morgenthau yang menjelaskan pentingnya kepentingan nasional dalam teori politik internasionalnya yang realis. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa bahwa strategi diplomasi harus berdasarkan kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral dan ideologi.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Indonesia Terhadap Pelanggaran Teritorial Kedaulatan Indonesia Di Perairan Natuna Utara

Indonesia tidak pernah mengakui —*Nine Dash Line* Cina, karena hal tersebut hanya melalui persetujuan sepihak dan tidak pernah dibahas dalam konvensi hukum laut internasional serta bertentangan dengan UNCLOS 1982 sebagaimana telah diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016. Langkah ini sebagai upaya yang jelas dalam menangani klaim sepihak.

Dalam hubungan internasional, setiap negara memiliki tujuan untuk

¹⁹ Mas' oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES

²⁰ *Ibid*, hal 140

mencapai, memperjuangkan, merealisasikan, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional menjadi dasar kebijakan luar negeri dan ide moral yang harus dipertahankan dan dipromosikan oleh pemimpin negara.²¹

Negara Indonesia dalam menghadapi klaim sepihak yang dilakukan Cina harus bersifat objektif dan subjektif dengan memasukkan kepentingan nasionalnya yakni ekonomi dan kedaulatan.²² Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional suatu negara dibagi menjadi empat kategori yaitu :²³

1. Kepentingan Pertahanan (Defence Interest) yaitu kepentingan nasional yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. upaya suatu negara dalam mengejar
2. Kepentingan Ekonomi (Economic Interest) yaitu kepentingan nasional yang berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dengan menjalin hubungan dengan negara lain.

²¹ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*.

²² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) —Perkembangan Di Laut Cina Selatan Dan Dampaknya Bagi Stabilitas Politik Dan Keamanan Di Kawasan Asia Pasifik : Penguatan Posisi Dan Strategi RI" dalam <http://kemlu.go.id>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

²³ Donald E. Nuechterlein, —National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making, in S. Williams, *The Role of the National Interest in the National Security Debate (United Kingdom: Royal Collage of Defense Studies, 2012)*, 33.

3. Kepentingan Tatanan Dunia (World Order Interest) adalah kepentingan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional agar tercipta rasa aman bagi setiap negara dalam melakukan interaksi dalam sistem internasional.

4. Kepentingan Ideologi (Ideological Interest) adalah kepentingan nasional untuk mempertahankan dan melindungi ideologi negara, serta mendorong nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat guna mencapai kebaikan yang universal.

Konsep Kepentingan Nasional digunakan untuk menjelaskan dan memahami perilaku aktor-aktor internasional. Dalam perspektif realis, Kepentingan Nasional disamakan dengan

power. *Power* dalam Hubungan Internasional tidak hanya diartikan sebagai kekuatan *tangible* dari suatu negara namun juga kekuatan negara dalam membangun sebuah pengaruh terhadap negara lain di dalam arena Politik Internasional.²⁴ Indonesia memiliki pilihan strategis untuk mencegah konflik terbuka di Perairan Natuna Utara dalam bentuk kerjasama yang tidak menimbulkan sensitivitas antara Indonesia dengan Cina.

Respon Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengambil sikap menindaklanjuti kasus illegal fishing dengan pendekatan damai yang disebut

²⁴ Yani, Yanyan Mochamad dan Perwita. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

sebagai diplomasi damai atau diplomasi pertahanan. Di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Senin 20 Januari 2020, Prabowo mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI membahas beberapa isu strategis, salah satunya mengenai Perairan Natuna. Raker tersebut akan membicarakan terkait pembangunan kekuatan di wilayah Natuna.²⁵ Prabowo dan Komisi I DPR-RI setuju mengucurkan anggaran untuk melengkapi kapal patroli Bakamla dengan senjata. Persenjataan yang dimaksud adalah 20 mitraliur 12,7 MM dari PT. Pindat.²⁶ Dengan ini Bakamla semakin kuat untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah Perairan Indonesia.

Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Kepemimpinan Jokowi

Politik luar negeri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dapat dilihat dari rumusan Renstra Kemenlu 2015-2019. Politik luar negeri RI akan dititikberatkan pada identitas sebagai negara kepulauan dalam diplomasi dan kerja sama internasional. Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2014, Jokowi adalah presiden yang memberikan perhatian khusus terhadap dunia maritim yang secara spesifik menyinggung visinya untuk memperkuat Indonesia dalam bidang maritim. Visi tersebut tercermin melalui kutipan pidato Jokowi yang berbunyi —kita telah lama memungungi samudra, laut, selat, dan

teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia.²⁷ Poros maritim dunia dalam Renstra Kemenlu terdiri dari Lima pilar utama, yaitu:²⁸

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia
2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama
3. Memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan wisata maritim
4. Menerapkan diplomasi maritim melalui peningkatan kerja sama maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara lain, bukan memisahkan.
5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga

²⁷ Nurhasim, Ahmad, 2014. Pidato Jokowi: Sudah Lama Kita Memungungi Laut
<https://nasional.tempo.co/read/615707/pidato-jokowi-sudah-lama-kita-memungungilaut>, diakses 1 April 2023

²⁸ Ditjen KSA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia". 15 November 2014.
<http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaranpers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx>, diakses pada tanggal 1 April 2023.

keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia memiliki visi Poros Maritim Dunia untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan visi tersebut, Jokowi mendorong penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan kelautan Indonesia, salah satunya adalah permasalahan penangkapan ikan ilegal yang merupakan hambatan dari visi Poros Maritim Dunia. Modal utama yang dijadikan landasan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia tertuang didalam RPJPN 2005-2025, menyatakan bahwa dalam misi untuk mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara kepulauan yang mandiri, maju kuat dan berbasis pada kepentingan Nasional. Yang terdiri dari:²⁹

1. Membangkitkan wawasan dan Budaya bahari
2. Meningkatkan dan Menguatkan Peran SDM di bidang Kelautan
3. Menetapkan Wilayah NKRI, aset dan hal-hal terkait di dalamnya termasuk kewajiban yang telah digariskan oleh hukum laut UNCLOS 1982.
4. Melakukan Pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset NKRI.
5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal dan berkelanjutan
6. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.

²⁹ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Kemampuan Keamanan Laut

Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan

penegakan hukum di laut dalam rangka menjamin kebebasan pengguna laut dari ancaman di laut melalui kehadiran di laut, penindakan dan penyidikan, pencarian/pertolongan yang di lakukan melalui upaya-upaya :³⁰

1. Meningkatkan kerjasama secara sinergis dengan instansi penegak hukum di laut lainnya dalam pelaksanaan patroli keamanan laut dengan melakukan operasi secara selektif sesuai kemampuan kapal.
2. Mengembangkan kerjasama dengan negara-negara tetangga melalui pelaksanaan patroli terkoordinasi (coordinated patrol) dan pertukaran informasi terkait keamanan laut.
3. Mendukung kebijakan khusus yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi ancaman-ancaman khusus terhadap keamanan laut, seperti pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perikanan Ilegal.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas operasi keamanan laut yang dilaksanakan dengan memanfaatkan data intelijen yang akurat, tepat waktu dan tepat sasaran.
5. Merancang pola operasi dengan fokus kehadiran dan penindakan di wilayah rawan pelanggaran hukum, daerah perbatasan, wilayah pulau terluar serta selat strategis untuk meningkatkan daya tangkal.

³⁰ Dokumen Resmi Kebijakan Perencanaan TNI Angkatan Laut Tahun 2021, hal 36-37

Keuntungan Hubungan diplomatik Indonesia-Cina bagi Indonesia

Keuntungan kerjasama antara Indonesia dengan Cina dapat dilihat sebagai salah satu alasan utama mengapa Indonesia kemudian memutuskan untuk melakukan pertahanan terhadap kebijakan Cina di Laut Natuna Utara. Hal yang didapatkan Indonesia dari kerjasama tersebut berkisar pada aspek-aspek yang sama dengan ancaman yang ditimbulkan oleh klaim Cina di Laut Cina Selatan, yaitu pada bidang ekonomi, politik, dan militer.³¹

Hubungan kedua negara dimulai dengan kerjasama di bidang ekonomi; khususnya di bidang investasi, perdagangan, dan bantuan luar negeri. Cina sendiri baru dipandang sebagai partner strategis di bidang ekonomi pada tahun 1980-an, ketika perekonomian Cina mengalami kenaikan yang signifikan.³²

Selain keuntungan yang Indonesia dapatkan di bidang ekonomi; dengan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, Indonesia juga mendapatkan beberapa manfaat di bidang politik, baik itu di level nasional maupun regional. Pertama, hubungan diplomatik dengan Cina membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam isu-isu yang melibatkan Cina di Asia Tenggara.

Sebelumnya telah dibahas bahwa Indonesia sempat gagal menjalankan perannya sebagai perantara di dalam kasus pelanggaran HAM di kamboja; karena Indonesia memiliki kesulitan untuk melakukan engagement dengan

³¹ Aisha R K, Strategi Hedging Indonesia Terhadap Klaim Teritorial Cina Di Laut Cina Selatan Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 17 No. 1 Mei 2015

³² Laksmana, —Variations on a theme: Dimensions of Ambivalence in Indonesia-China Relations, 27

Cina dan negara-negara komunis lainnya.³³ Kedekatan Indonesia-Cina di bidang militer juga dilakukan untuk mendapatkan perhatian Washington di bidang ini. Singkatnya hubungan kerjasama militer yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina tidak disertai dengan kepercayaan yang tulus, ataupun pengakuan mengenai intensi damai Cina di Laut Cina Selatan. Hubungan ini lebih banyak dilaksanakan secara pragmatis, mengingat Indonesia masih menyimpan kecurigaan atas ekspansi wilayah Cina di Laut Cina Selatan.³⁴ Karena itu, kedekatan militer Indonesia dengan Cina juga diharapkan dapat menjadi saah satu faktor bagi Beijing untuk mempertimbangkan ulang kebijakankebijakannya yang bersifat Agresif—khususnya yang menyinggung kepentingan Indonesia di dalamnya.

Diplomasi Pertahanan Indonesia

Diplomasi pertahanan adalah penggunaan sumber daya pertahanan di masa damai dan tanpa tekanan eksternal untuk menggapai tujuan nasional, terutama dalam hubungan antar negara.³⁵ Secara lebih khusus, diplomasi

³³ Rizal Sukma, —The Suspension of Diplomatic Ties: Its function and the roots of Resistance, Indonesia and China: the Politics of a Troubled

Relationship, (Routledge: 1999), 58-59. 70

Shannon Tiezzi, —Why China isn't Interested in a South China Sea Code of Conduct, (<http://thediplomat.com/2014/02/why-china-isnt-interested-in-a-south-china-sea-code-of-conduct/>), 10 April 2023, 13.07 WIB

³⁴ Pew Research Center, —American Character Gets Mixed Reviews, dalam Laksmana, —Variations on a theme: Dimensions of Ambivalence in Indonesia-China Relations, 26-30.

³⁵ Cheyre, Juan Emilio. 2013. *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press chapter Defence Diplomacy.

pertahanan terjadi ketika angkatan bersenjata dan infrastruktur pertahanan (terutama kementerian pertahanan) digunakan dalam masa damai sebagai alat kebijakan luar negeri.³⁶ Dalam hal ini, diplomasi pertahanan di era pasca-Perang Dingin biasanya diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian konflik. Tujuan-tujuan ini misalnya dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang sering disebut sebagai diplomasi pertahanan, termasuk latihan dan kerja sama antarmiliter, pertukaran perwira di lembaga pendidikan dan pelatihan, operasi gabungan multilateral, atau forum-forum diplomatik perwira dan pejabat kementerian pertahanan. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki manajemen krisis dan *confidence building measures* melalui pergeseran norma dan sikap antar institusi militer, meningkatnya transparansi dalam hubungan pertahanan, dan menguatnya kepercayaan strategis.³⁷ Berbagai studi diplomasi pertahanan seringkali mengartikannya sebagai upaya-upaya diplomasi dengan menggunakan instrumen (atau aktor dari) sektor pertahanan (biasanya dari militer) untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri.

SIMPULAN

Indonesia mempertahankan Diplomasi Pertahanan dengan Cina dalam menyelesaikan konflik Perairan Natuna Utara tahun 2019 pada kasus Illegal Fishing untuk menjaga hubungan bilateral

lewat berbagai macam kerjasama yang telah di sepakati. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai pendekatan Upaya penyelesaian konflik *illegal fishing* dilakukan melalui pemberian nota protes serta pemanggilan Duta Besar Cina. Nota protes ini di terbitkan Indonesia setelah adanya perlawanan dari Cina dengan mengklaim bahwa Perairan Natuna Utara menjadi bagian wilayahnya. Diplomasi tersebut bertujuan untuk melakukan negosiasi batas wilayah maritim serta menjaga kepentingan sumberdaya kelautan dari IUU Fishing antara Indonesia dengan Cina.

Indonesia dalam hal ini tidak perlu mengajukan diri sebagai negara *claimant* karena ZEE Indonesia sudah sesuai pengukurannya berdasarkan UNCLOS. Indonesia harus tetap aktif berpartisipasi dalam penyelesaian konflik di Perairan Natuna Utara, mengupayakan diplomasi damai demi terciptanya kestabilan ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan Perairan Natuna Utara. Disamping permasalahan kedaulatan dan kepentingan ekonomi, masalah keselamatan pelayaran juga menjadi isu yang penting, terutama yang berkaitan dengan ancaman pembajakan dan pencurian di wilayah Natuna. Dengan demikian strategi pertahanan Indonesia terkait dengan maritim tidak bisa dihadapi oleh satu kementerian, tapi membutuhkan kerjasama lintas departemen dan dibimbing satu strategi terpadu.

³⁶ Cottey, Andrew. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New roles for military cooperation and assistance*. Number 365 in —Adelphi Paperl Routledge.

³⁷ Muthanna, KA. 2011. —Military diplomacy.l *Journal of Defence Studies* 5(1):15.

Referensi

Buku

- Burchill Scott dan Andrew Linklater. 2016. *Theoris of International Relations*, Terj. Sobirin. Bandung : Nusamedia.
- Donald E. Nuechterlein, —National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making,|| in S. Williams, *The Role of the National Interest in the National Security Debate (United Kingdom: Royal Collage of Defense Studies, 2012)*, 33
- Hans Morgenthau. 1990. *Politics Among Nations*, cet. 1, ter. S. Maimoen, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mas' oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES.
- Morgan, Patrick. 1982. *Theories and Approaches to International Politics : What are We Think?* New Brunswick Transaction.
- P. Yusgiantoro, —*Maritime Safety and Freedom in South-East Asial*, *Military Technology*, 2013, 37(3), 8-9.
- Reich Robert. 2009 *The Work of Nations : Preparing Ourselves for 21st Century*, Terj. Susiana Iskandar. Bandung : Percetakan Angkasa.
- Sidy, Dairatul, *Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia-Cina di Era Pemerintahan Joko Widodo*,

Jurnal Kajian Lemhannas RI ,
Edisi 37, Maret 2019

- Singarimbun Masri dan Efendi Sofyan. 1988. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Suyanto, Bagong dan Satinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial sebagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Yani, Yanyan Mochamad dan Perwita. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurnal

- Cheyre, Juan Emilio. 2013. *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. Oxford University Press chapter Defence Diplomacy.
- Cottey, Andrew. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New roles for military cooperation and assistance*. Number 365 in —Adelphi Paper|| Routledge.
- C. P. F. Luhuliima. 2007. *Pendekatan Multitrack dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan : Upaya dan Tantangan*. *Global Jurnal* Vol. 9. No.1.
- Damos Dumoli Agusman. 2017. *The South China Sea UNCLOS Tribunal Award 2016 : What It Hs Changed and What It Does Mean to Indonesia*. *Indonesian Journal of International Law*, Vol.14. No.2.
- Hasjim Djalal, *Indonesia and the Law of the Sea* (Jakarta: Centre for

- Strategic and International Studies, 1995), hlm.17
- Hasyim Djalal, *Diplomasi dan Kedaulatan Maritim Indonesia*, Aji Widiatmaja 16 Bab 3 Penarikan Diri Amerika. Filsafat dan Teori-teori Pertahanan, Kapita Selekt : Teori dan Praktek
- Hendra Maujana Saragih. 2018. *Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (JIPSi) Vol. 8. No. 1.
- Hikmahanto Junawa. *Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional : Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional*. Undang ; Jurnal Hukum, 2(1), hal,4.
- Humphrey Wangke 2020, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis : Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia Di Laut Natuna Utara*, Vol. XII, No.1/I Puslit, Januari 2020.
- Ignatius Ismanto. 2015. *Willayah Perbatasan di tengah tantangan Globalisasi Ekonomi*, Verity Jurnal Hubungan Internnasionnal, vol. 7. No. 14.
- Ismail, Kusasi, Fitriana. 2018. *Perikanan Natuna dan Kesejahteraan Nelayan Pasca Penerapan IUU Fishing*. Indonesia Marine Fellows Program – MFP Riset Ekonomi Terapan dalam Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Kelautan. Bogor: FPIK IPB.
- Ismah Rustam, *Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita- cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesian Perspective*, 2016 (Januari- Juni): hlm 1- 21.
- Kraska, James. 2011. *Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea*. ABC-CLIO
- Kraska, James and Raul Pedrozo. 2013. *International maritime security law*. Martinus Nijhoff Publishers
- Le Mière, Christian. 2014. *Maritime diplomacy in the 21st century: Drivers and challenges*. Routledge.
- M. Saeri. 2012. *Teori Hubungan Internasional sebuah Pendekatan Paradigmatik*, Jurnal Transnasional, Vol. 3. No. 2.
- Mohammad Rosyidin. 2016. *Isu Natuna dan Kebijakan Realpolitik Indonesia*, Analisis CSIS, Vol 45. No. 4, Kuartal keempat.
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta, 2003
- Muthanna, KA. 2011. —Military diplomacy. *Journal of Defence Studies* 5(1):15.
- Prameshwari Ratna, Muchsin Indris, Nanik Astuti. 2017. —*Klaim Tiongkok tentang Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982*, DIPO LAW JURNAL Vol 6. No. 2

Simela Victor Muhammad, Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral, Jurnal Politica Vol.3, No.1, Mei 2012

Suharti M. Natsir, M. Subkhan Rubiman, dan Singgih P.A Wibowo. 2011. —*Komunitas Foraminifera Bentuk di Perairan Kepulauan Natuna* dalam Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 3, No. 2, Hal 21-23.

Suharna, Karmin. 2012. Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. Majalah Ketahanan Nasional, Edisi 94.

Dokumen Resmi

The South China Sea Arbitration Award
of July 2016

Kebijakan Perencanaan TNI Angkatan Laut Tahun 2021, Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Laut.